

Hibah Antara Suami-Istri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Perikatan Hibah = The Grants between Husband and Wife in Perspective of Law in Indonesia and Notary responsibility Over the Binding of Grants

Venny Talitha Shirleen Rahma Latief, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920555639&lokasi=lokal>

Abstrak

Hibah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain, ketika pemberi hibah masih dalam keadaan hidup. Dengan dilakukannya Hibah, menunjukkan adanya sebuah tindakan hukum. Dalam konteks pemberian Hibah, Hibah tidak dapat diberikan melebihi sepertiga dari total harta yang dimiliki. Dalam kasus yang diteliti, seorang suami memberikan Hibah kepada istri atas seluruh harta kekayaannya dan mendaftarkannya kepada Notaris. Hal tersebut melanggar peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan bagian mutlak yang didapatkan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan Hibah yang berlaku di Indonesia dari suami kepada istri atau istri kepada suami pada saat perkawinan berlangsung dan mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum atas akta Hibah yang dicatatkannya (waarmerking). Dalam menjawab permasalahan hukum tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatoris, untuk menganalisis permasalahan pemberian Hibah suami kepada istri pada saat perkawinan berlangsung. Dikaitkan pada norma hukum serta fakta hukum dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif hukum mengenai pengaturan Hibah di Indonesia. Khususnya pemberian Hibah suami kepada istri atau sebaliknya pada saat perkawinan berlangsung. Hukum Perdata tidak memperbolehkan Hibah suami kepada Istri, sedangkan Hukum Islam memperbolehkan Hibah suami kepada istri. Perbedaan di antara kedua sistem hukum ini menyebabkan dua pemahaman yang berbeda dalam masyarakat, di mana pemahaman mengenai pemberian Hibah suami kepada istri tersebut akan berdampak pada kewarisan. Perikatan Hibah yang didaftarkan kepada Notaris yang tidak sesuai dengan pengaturan hukum di Indonesia dianggap cacat hukum atau batal demi hukum.

.....Hibah is a grant given from one party to another, in a period where the granter is still living. A The performance of a hibah is considered as a legal act. In the context of hibah, the grant cannot surpass more than 1/3rd of the granter's total wealth. In a case study, a husband granted hibah to his wife regarding all his wealth and registered it to a notary. Said act violates the laws of KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, lit. Compilation of Sharia Economic Law) and the ultimate decision of what the grantee is entitled to receive within KHI (Compilation of Islamic Law) The problem in this research is the ruling of Hibah that applies in Indonesia between husband and wife while they are lawfully wed and concerns the responsibility of the notary in their service as a public official over the Hibah that is recorded (waarmerking). In the resolving of said legal issue, the method of jurisdiction normative research. With the use of explanatory type research, to analyze the issue of the hibah grant from husband to wife while they are wed. Related to the normative and factual laws in the viewpoint of law that applies in Indonesia. The result of the research shows the difference in legal viewpoints regarding Hibah grants in Indonesia. Specifically, civil law forbids a grant from husband to wife, while Islamic Law allows it. The differences between these two legal systems lead to two different comprehension in society, where the comprehension about the giving the grants of a

husband to wife will have an impact on inheritance. The Hibah Grant Association that is registered to the notary who that does not correspond with the ruling of law in Indonesia that is considered legally disabled or null and void.